



Arsip. (14) 24/8/12

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu perlu dikembangkan jabatan fungsional umum;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum maka perlu adanya pengaturan jabatan fungsional umum untuk memberikan penegasan tentang tugas dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
9. Penamaan jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan selain jabatan struktural dan fungsional tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Jabatan fungsional umum adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PNS sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Semarang.

Pasal 3

Pengaturan Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan tugas dan fungsi PNS dan CPNS dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat struktural;

- b. memberikan rumusan uraian jabatan PNS dan CPNS pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB III

PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 4

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengangkatan PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. uraian jabatan;
 - c. golongan ruang;
 - d. pendidikan formal;
 - e. kompetensi pegawai.
- (4) Kepala SKPD wajib menyusun rincian uraian jabatan fungsional umum di lingkungan kerjanya

BAB IV

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FORMASI JABATAN

Pasal 7

- (1) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar formasi PNS.

- (2) Formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan CPNS.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Umum dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Setiap CPNS dan PNS yang sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menduduki Jabatan Fungsional Umum tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 19

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	KODE	NAMA JABATAN
1	2	3
1	0001	Agendaris
2	0002	Ajudan walikota
3	0003	Analisis biaya bencana
4	0004	Analisis fasilitas dan perlengkapan transportasi
5	0005	Analisis hukum
6	0006	Analisis jabatan
7	0007	Analisis jalan/lalu lintas
8	0008	Analisis kebutuhan Barang Milik Daerah
9	0009	Analisis kebutuhan pokok masyarakat
10	0010	Analisis kepegawaian
11	0011	Analisis kesehatan
12	0012	Analisis ketahanan pangan
13	0013	Analisis laboran
14	0014	Analisis pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah
15	0015	Analisis perdagangan luar negeri
16	0016	Analisis potensi daerah
17	0017	Analisis potensi parkir
18	0018	Analisis produk hukum
19	0019	Analisis promosi investasi
20	0020	Analisis rekayasa keselamatan sarana prasarana
21	0021	Analisis tata praja
22	0022	Analisis usaha perdagangan
23	0023	Arsiparis
24	0024	Assesor investasi
25	0025	Auditor
26	0026	Caraka
27	0027	Fasilitator konsumsi dan keamanan pangan
28	0028	Fasilitator pengadaan barang dan jasa
29	0029	Fasilitator pengembangan distribusi pangan
30	0030	Fasilitator pengembangan ketersediaan pangan
31	0031	Juru bengkel
32	0032	Juru gambar
33	0033	Juru gambar perancangan teknis
34	0034	Juru hitung
35	0035	Juru kir
36	0036	Juru masak
37	0037	Juru tagih
38	0038	Juru taman
39	0039	Juru ukur
40	0040	Kameraman
41	0041	Kasir
42	0042	Koordinator pelaksana
43	0043	Koordinator penyapu
44	0044	Koordinator penyimpanan dan pengeluaran barang
45	0045	Koordinator pool seroja
46	0046	Koordinator sim
47	0047	Koordinator tenaga khusus
48	0048	Laboran
49	0049	Medik verteriner
50	0050	Mekanik alat berat dan kendaraan dinas
51	0051	Notulis acara sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
52	0052	Operator alat berat
53	0053	Operator foto copy
54	0054	Operator komputer
55	0055	Operator lift dan genset
56	0056	Operator mesin potong rumput
57	0057	Operator mobil Pemadam Kebakaran

1	2	3
58	0058	Operator pompa pengendali rob dan banjir
59	0059	Operator radio dan telekomunikasi
60	0060	Operator telepon/fax
61	0061	Pamong panti sosial
62	0062	Paramedik veteriner
63	0063	Pawang hewan
64	0064	Pegelola editing dan verifikasi data pendidikan
65	0065	Pekarya rawat jalan
66	0066	Pelaksana akuntansi
67	0067	Pelaksana pemeliharaan jalan dan jembatan
68	0068	Pelaksana pengobatan dan perawatan obat
69	0069	Pelaksana penilik jalan
70	0070	Pelaksana penyedia bahan jalan
71	0071	Pelaksana penyedia suku cadang
72	0072	Pelaksana perancangan teknis
73	0073	Pelaksana teknis bimbingan masyarakat
74	0074	Pelaksana teknis persemaian dan penanaman
75	0075	Pelaksana verifikasi askes
76	0076	Pelaksana verifikasi jamsostek
77	0077	Pelaksana verifikasi pihak III lainnya
78	0078	Pelaksana verifikasi umum
79	0079	Pelatih aquatik
80	0079	Pelatih bridge
81	0079	Pelatih sepatu roda
82	0079	Pelatih taekwondo
83	0079	Pelatih tenis meja
84	0079	Pelatih terbang layang
85	0079	Pelatih kempo
86	0080	Pemandu wisata
87	0081	Pemberi konsultasi dan bantuan hukum
88	0082	Pembimbing kegiatan kelembagaan tani
89	0083	Pembimbing ketrampilan
90	0084	Pembimbing pertanian
91	0085	Pembuat sambutan walikota
92	0086	Pemroses administrasi Batas Usia Pensiun
93	0087	Pemroses karis/karsu, taspen dan askes
94	0088	Pemroses mutasi pegawai
95	0089	Pemroses pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil
96	0090	Pemroses perijinan
97	0091	Pemulasaran jenazah
98	0092	Pemungut retribusi
99	0093	Penangkar benih
100	0094	Penarik retribusi
101	0095	Penata laporan keuangan
102	0096	Penata ruang
103	0097	Penera
104	0098	Penerjemah
105	0099	Pengadministrasi akta catatan sipil
106	0100	Pengadministrasi akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak
107	0101	Pengadministrasi akta perkawinan dan perceraian
108	0102	Pengadministrasi akte kelahiran
109	0103	Pengadministrasi bantuan hukum
110	0104	Pengadministrasi barang milik daerah
111	0105	Pengadministrasi e procurement
112	0106	Pengadministrasi ijin makam
113	0107	Pengadministrasi jabatan fungsional
114	0108	Pengadministrasi karcis parkir
115	0109	Pengadministrasi kepegawaian
116	0110	Pengadministrasi keuangan
117	0111	Pengadministrasi Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
118	0112	Pengadministrasi parkir
119	0113	Pengadministrasi pendaftaran penduduk
120	0114	Pengadministrasi perpindahan penduduk
121	0115	Pengadministrasi perubahan data dan dokumen penduduk

1	2	3
122	0116	Pengadministrasi produk hukum
123	0117	Pengadministrasi surat
124	0118	Pengadministrasi umum
125	0119	Pengadministrasi penagihan
126	0120	Pengadministrasi penetapan
127	0121	Pengambil data sampel
128	0122	Penganalis kualitas air
129	0123	Penganalis kualitas udara
130	0124	Penganalisa dampak lalu lintas
131	0125	Penganalisa data kelembagaan
132	0126	Penganalisa evaluasi kinerja pemerintah
133	0127	Penganalisa kebutuhan diklat
134	0128	Penganalisa kesehatan hewan
135	0129	Penganalisa lalu lintas
136	0130	Penganalisa pemeliharaan bangunan
137	0131	Penganalisa program-program pendidikan
138	0132	Penganalisa tanah struktur
139	0133	Penganalisa, pengembang dan pengkaji kurikulum
140	0134	Penganalisa data keuangan
141	0135	Pengantar kerja
142	0136	Pengawas benih ikan
143	0137	Pengawas benih tanaman
144	0138	Pengawas dan pengendali kominfo
145	0139	Pengawas jalan
146	0140	Pengawas keselamatan pelayanan
147	0141	Pengawas ketenagakerjaan
148	0142	Pengawas lapangan
149	0143	Pengawas lapangan koservasi dan eksplotasi Sumber Daya Air
150	0144	Pengawas lapangan operasional dan tata air
151	0145	Pengawas lapangan sarpras tata air
152	0146	Pengawas operasional alat berat
153	0147	Pengawas pembangunan
154	0148	Pengawas pengadaan bahan
155	0149	Pengawas pengendalian pengolahan limbah
156	0150	Pengawas pengendalian sarana prasarana lingkungan
157	0151	Pengawas pengolahan sampah
158	0152	Pengawas produksi peternakan
159	0153	Pengawas produksi, pemasaran perkebunan dan hutan
160	0154	Pengawas reklame
161	0155	Pengawas sistem kelistrikan
162	0156	Pengawas standarisasi teknologi industri
163	0157	Pengawas tata bangunan dan perumahan
164	0158	Pengawas teknik alat berat
165	0159	Pengawas teknis bangunan dan perumahan
166	0160	Pengawas teknis jalan dan jembatan
167	0161	Pengawas teknis lapangan
168	0162	Pengawas teknis pengairan
169	0163	Pengawas teknologi jalan dan jembatan
170	0164	Pengelola aset daerah
171	0165	Pengelola barang
172	0166	Pengelola belanja gaji
173	0167	Pengelola belanja non gaji
174	0168	Pengelola Barang Milik Daerah
175	0169	Pengelola dan pengurus barang
176	0170	Pengelola dan penyusun laporan potensi ekonomi
177	0171	Pengelola dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah
178	0172	Pengelola data Bantuan Operasional Sekolah
179	0173	Pengelola data kearsipan
180	0174	Pengelola data kepegawaian
181	0175	Pengelola diklat fungsional
182	0176	Pengelola diklat kepemimpinan
183	0177	Pengelola diklat prajab
184	0178	Pengelola diklat teknis
185	0179	Pengelola disiplin dan pensiun pegawai

1	2	3
186	0180	Pengelola gudang farmasi
187	0181	Pengelola gudang vaksin
188	0182	Pengelola ijin pendirian sekolah
189	0183	Pengelola inventarisasi aset
190	0184	Pengelola jasa pariwisata
191	0185	Pengelola karier pegawai
192	0186	Pengelola kendaraan dinas dan operasional
193	0187	Pengelola kepangkatan
194	0188	Pengelola kepegawaian
195	0189	Pengelola keperawatan
196	0190	Pengelola kerjasama kelembagaan
197	0191	Pengelola kesehatan hewan
198	0192	Pengelola kesejahteraan pegawai
199	0193	Pengelola kesiswaan
200	0194	Pengelola lapangan sepak bola Citarum
201	0195	Pengelola mesin pendingin
202	0196	Pengelola monitoring sekolah
203	0197	Pengelola mutasi dan Nomor Induk Siswa Nasional
204	0198	Pengelola pagelaran kesenian
205	0199	Pengelola pelayanan medik
206	0200	Pengelola pembinaan kesenian
207	0201	Pengelola penetapan
208	0202	Pengelola pengamanan aset
209	0203	Pengelola pengembangan pegawai
210	0204	Pengelola pengembangan pendidikan
211	0205	Pengelola pengembangan sumber daya ternak
212	0206	Pengelola penunjang medik
213	0207	Pengelola penunjang non medik
214	0208	Pengelola perlengkapan protokoler
215	0209	Pengelola perpustakaan
216	0210	Pengelola potensi seni
217	0211	Pengelola produksi dan pemasaran
218	0212	Pengelola promosi pariwisata
219	0213	Pengelola sarana prasarana
220	0214	Pengelola sarana wisata
221	0215	Pengelola tanaman
222	0216	Pengelola update data pendidikan
223	0217	Pengelola urusan kesiswaan
224	0218	Pengelola usaha rekreasi dan hiburan
225	0219	Pengelola verifikasi dan evaluasi
226	0220	Pengembang teknologi pendidikan
227	0221	Pengemudi
228	0222	Pengemudi alat berat
229	0223	Pengemudi ambulance
230	0224	Pengemudi operasional pelayanan
231	0225	Pengemudi peralatan dan perbekalan jalan
232	0226	Pengemudi truk dump
233	0227	Pengemudi truk pengangkut sampah
234	0228	Pengemudi truk tangki
235	0229	Pengendali administrasi kependudukan
236	0230	Pengendali akreditasi sekolah
237	0231	Pengendali dampak lingkungan
238	0232	Pengendali ijin penelitian/pengabdian/observasi
239	0233	Pengendali pembangunan makam
240	0234	Pengendali reklame jatuh tempo
241	0235	Pengendali sistem pengolahan data pendidikan
242	0236	Pengevaluasi dan monitoring
243	0237	Penggerak swadaya masyarakat
244	0238	Penginventaris dan pengolah data jalan dan jembatan
245	0239	Pengkaji data pengembangan kelembagaan dan sdm
246	0240	Pengkaji hubungan industrial
247	0241	Pengkaji Izin Mendirikan Bangunan
248	0242	Pengkaji industri alat transportasi
249	0243	Pengkaji kerjasama kemitraan

1	2	3
250	0244	Pengkaji pengembangan teknologi jalan dan jembatan
251	0245	Pengkaji perijinan geologi dan pertambangan
252	0246	Pengkaji perijinan industri agro dan kimia
253	0247	Pengkaji perijinan industri logam, mesin dan tekstil
254	0248	Pengkaji permukiman
255	0249	Pengkaji rancangan perjanjian kerjasama
256	0250	Pengkaji teknik bangunan sarpras persampahan
257	0251	Pengkaji teknologi benih
258	0252	Pengolah data
259	0253	Pengolah data andalalin
260	0254	Pengolah data anggaran
261	0255	Pengolah data bantuan sosial
262	0256	Pengolah data beasiswa
263	0257	Pengolah data dan dokumen penduduk
264	0258	Pengolah data dan informasi bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
265	0259	Pengolah data dan pelaporan rencana kerja
266	0260	Pengolah data dan pengkaji bantuan keagamaan
267	0261	Pengolah data evaluasi dan pelaporan
268	0262	Pengolah data hubungan antar lembaga
269	0263	Pengolah data iklan dan reklame
270	0264	Pengolah data informasi publik dan promosi
271	0265	Pengolah data jejaring dan informasi keluarga berencana
272	0266	Pengolah data kedaruratan
273	0267	Pengolah data kelembagaan
274	0268	Pengolah data kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
275	0269	Pengolah data kelembagaan koperasi
276	0270	Pengolah data kelembagaan masyarakat
277	0271	Pengolah data kepegawaian
278	0272	Pengolah data kerjasama
279	0273	Pengolah data kesehatan masyarakat
280	0274	Pengolah data kesejahteraan sosial
281	0275	Pengolah data kesiapsiagaan
282	0276	Pengolah data ketatalaksanaan
283	0277	Pengolah data keuangan
284	0278	Pengolah data konsumsi dan keamanan pangan
285	0279	Pengolah data laporan keuangan
286	0280	Pengolah data logistik
287	0281	Pengolah data pasca panen dan pengolahan
288	0282	Pengolah data pekebunan dan kehutanan
289	0283	Pengolah data pelayanan KB dan perlindungan hak reproduksi
290	0284	Pengolah data peliputan dan dokumentasi
291	0285	Pengolah data pemberitaan analisa media
292	0286	Pengolah data pemeliharaan jalan jembatan
293	0287	Pengolah data pemerintahan kelurahan
294	0288	Pengolah data pemerintahan umum
295	0289	Pengolah data pencegahan
296	0290	Pengolah data pendidikan
297	0291	Pengolah data pengarusutamaan gender
298	0292	Pengolah data pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
299	0293	Pengolah data pengawas pemerintah bidang pembangunan
300	0294	Pengolah data pengawas pemerintah bidang pemerintahan
301	0295	Pengolah data pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
302	0296	Pengolah data pengembangan distribusi pangan
303	0297	Pengolah data pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan
304	0298	Pengolah data pengembangan kapasitas lembaga
305	0299	Pengolah data pengembangan ketersediaan pangan
306	0300	Pengolah data pengembangan usaha ekonomi dan ketahanan keluarga
307	0301	Pengolah data perencanaan
308	0302	Pengolah data perencanaan ruang dan lingkungan hidup
309	0303	Pengolah data perijinan
310	0304	Pengolah data perijinan kesra dan lingkungan
311	0305	Pengolah data perijinan pembangunan
312	0306	Pengolah data perijinan perekonomian
313	0307	Pengolah data perlindungan perempuan dan anak

1	2	3
314	0308	Pengolah data pertanahan
315	0309	Pengolah data produksi daerah
316	0310	Pengolah data rehabilitasi
317	0311	Pengolah data rekonstruksi
318	0312	Pengolah data rencana pengembangan pegawai
319	0313	Pengolah data rencana program pemerintahan
320	0314	Pengolah data rencana program pengembangan dunia usaha
321	0315	Pengolah data rencana program pengembangan ekonomi produksi
322	0316	Pengolah data rencana program pengembangan infrastruktur
323	0317	Pengolah data rencana program sosial dan budaya
324	0318	Pengolah data sosial budaya masyarakat
325	0319	Pengolah data statistik
326	0320	Pengolah data Unit Layanan Pengadaan
327	0321	Pengolah data urusan pemerintahan
328	0322	Pengolah lahan dan kebersihan
329	0323	Pengolah perijinan dan perencanaan program kegiatan lembaga keaksaraan dan kesetaraan
330	0324	Pengolah rencana anggaran
331	0325	Pengolah sumber daya ikan dan lingkungan
332	0326	Pengonsep dan pengolah data perusda
333	0327	Pengonsep program dan pelaporan kegiatan
334	0328	Penguji kendaraan bermotor
335	0329	Pengumpul data kelembagaan dan SDM bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
336	0330	Pengurus barang logistik
337	0331	Pengurus dan pengelola barang
338	0332	Penilai kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
339	0333	Penjaga dan pembersih kolam renang
340	0334	Penjaga gudang alat berat
341	0335	Penjaga gudang bahan jalan
342	0336	Penjaga gudang farmasi
343	0337	Penjaga kantor
344	0338	Penjaga malam
345	0339	Penjaga pintu air
346	0340	Penjaga sekolah
347	0341	Penyedia data perijinan
348	0342	Penyiap bahan sarana dan prasarana jalan
349	0343	Penyiap kegiatan acara sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
350	0344	Penyidik pegawai negeri sipil
351	0345	Penyuluh administrasi kependudukan
352	0346	Penyuluh koperasi dan ukm
353	0347	Penyuluh pencegahan bencana
354	0348	Penyuluh perindag/petugas penyelesaian kasus (panitera)
355	0349	Penyuluh pertanian
356	0350	Penyuluh peternakan
357	0351	Penyusun abstraksi hukum
358	0352	Penyusun analisa bahan
359	0353	Penyusun Analisis Standar Belanja
360	0354	Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan
361	0355	Penyusun bahan evaluasi rencana program dan laporan
362	0356	Penyusun bahan kebijakan dan sisdur akuntansi
363	0357	Penyusun bahan kerjasama
364	0358	Penyusun bahan kerjasama teknik luar negeri
365	0359	Penyusun bahan pembinaan pegawai
366	0360	Penyusun bahan pembuatan buku
367	0361	Penyusun bahan pendataan dan pemetaan Penerangan Jalan Umum
368	0362	Penyusun bahan perencanaan dan evaluasi
369	0363	Penyusun data sekolah
370	0364	Penyusun profil potensi investasi
371	0365	Penyusun program
372	0366	Penyusun program dan anggaran
373	0367	Penyusun program dan evaluasi
374	0368	Penyusun rencana pemetaan potensi sumberdaya kelautan
375	0369	Penyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir
376	0370	Penyusun rencana program
377	0371	Penyusun rencana program dan pelaporan, pengumpul data kelembagaan, pelayanan informasi kelemb

1	2	3
378	0372	Penyusun rencana program penelitian dan pengembangan
379	0373	Penyusun rencana program peralatan
380	0374	Penyusun rencana ruang dan tata ruang kota
381	0375	Penyusun surat perjanjian pinjam pakai dan SK status penggunaan
382	0376	Penyusun dan pengolah data perencanaan
383	0377	Perancang peraturan perundang-undangan
384	0378	Perawat
385	0379	Perencana
386	0380	Perencana dan pengevaluasi program
387	0381	Perencana kebutuhan pelatihan
388	0382	Perencana program dan pelaporan
389	0383	Perencana taman
390	0384	Perumus kebijakan teknis
391	0385	Petugas advokasi barang beredar
392	0386	Petugas advokasi dan bantuan hukum
393	0387	Petugas antar kerja
394	0388	Petugas customer service
395	0389	Petugas front office
396	0390	Petugas keamanan
397	0391	Petugas keamanan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
398	0392	Petugas kebersihan
399	0392	Petugas kebersihan gedung dan lapangan bulu tangkis
400	0392	Petugas kebersihan gedung pertemuan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
401	0392	Petugas kebersihan lap tenis dan PKL Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
402	0392	Petugas kebersihan lapangan citarum
403	0392	Petugas kebersihan lapangan sidodadi
404	0392	Petugas kebersihan lapangan tenis dan tribun
405	0392	Petugas kebersihan lingkungan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
406	0392	Petugas kebersihan truk pengangkut sampah
407	0393	Petugas ketertiban
408	0394	Petugas komunikasi
409	0395	Petugas lapangan
410	0396	Petugas lighting
411	0397	Petugas loket
412	0398	Petugas loket karcis kolam renang Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
413	0399	Petugas medik veteriner
414	0400	Petugas monitoring
415	0401	Petugas operasional lalu lintas
416	0402	Petugas operasional perparkiran
417	0403	Petugas operasional terminal Mangkang
418	0403	Petugas operasional terminal Penggaron
419	0403	Petugas operasional terminal Terboyo
420	0404	Petugas Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
421	0405	Petugas pajak
422	0406	Petugas pelayanan
423	0407	Petugas pelayanan reproduksi
424	0408	Petugas pelayanan umum
425	0409	Petugas pemadam kebakaran
426	0410	Petugas pemantau, pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan
427	0411	Petugas pembakar sampah medis
428	0412	Petugas pembantu operator alat berat
429	0413	Petugas pembibitan
430	0414	Petugas pembinaan pengembangan sumber daya
431	0415	Petugas pemelihara elemen dekorasi kota
432	0416	Petugas pemelihara gedung
433	0417	Petugas pemelihara penghijauan dan turus jalan
434	0418	Petugas pemelihara peralatan
435	0419	Petugas pemelihara taman
436	0420	Petugas pemeliharaan air dan listrik
437	0421	Petugas pemetaan dan penelitian geologi
438	0422	Petugas pemungut retribusi
439	0423	Petugas pemungut retribusi pkl
440	0424	Petugas penagih pajak daerah
441	0425	Petugas penanganan kebersihan

1	2	3
442	0426	Petugas penarik retribusi rumah sewa
443	0427	Petugas pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan
444	0428	Petugas pendaftaran dan pendataan
445	0429	Petugas penera
446	0430	Petugas penerima setoran
447	0431	Petugas pengadaan dan inventarisasi
448	0432	Petugas pengawas dan pengendali kerjasama
449	0433	Petugas pengawas sungai dan irigasi
450	0434	Petugas pengawasan dan pengendalian perparkiran
451	0435	Petugas pengecatan kanstin dan penyiraman
452	0436	Petugas pengelola air limbah
453	0437	Petugas pengelola Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit
454	0438	Petugas pengelola dan pembina Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi
455	0439	Petugas pengelola gedung pertemuan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
456	0440	Petugas pengelola gudang media
457	0441	Petugas pengelola lapangan gor Tri Lomba Juang
458	0442	Petugas pengelola lapangan Sidodadi
459	0443	Petugas pengelola peralatan dan perbekalan
460	0444	Petugas pengeluaran barang
461	0445	Petugas penilai retribusi
462	0446	Petugas penitipan barang kolam renang
463	0447	Petugas penjaga palang kereta
464	0448	Petugas penjaga pintu dan bendung air
465	0449	Petugas penyelesaian kasus (panitera)
466	0450	Petugas penyeteril alat
467	0451	Petugas penyimpanan barang
468	0452	Petugas penyuluh
469	0453	Petugas penyuluh hukum
470	0454	Petugas penyuluh ketertiban
471	0455	Petugas penyuluh pemadam kebakaran
472	0456	Petugas penyuluh SDM masyarakat pesisir
473	0457	Petugas perawatan gedung
474	0458	Petugas perawatan taman
475	0459	Petugas perawatan tanaman lap atletik gor Tri Lomba Juang
476	0460	Petugas perbengkelan
477	0461	Petugas perencana dan pengawas pekerjaan proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
478	0462	Petugas perijinan
479	0463	Petugas perijinan reklame
480	0464	Petugas pintu air dan jaga malam
481	0465	Petugas pompa banjir/teknisi mesin
482	0466	Petugas porporasi
483	0467	Petugas portir kolam renang Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
484	0468	Petugas pramu cuci
485	0469	Petugas promosi industri dan perdagangan
486	0470	Petugas promosi kesehatan (promkes)
487	0471	Petugas register akta kelahiran
488	0472	Petugas register akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak
489	0473	Petugas register akta perkawinan dan perceraian
490	0474	Petugas sanitasi
491	0475	Petugas sosial
492	0476	Petugas standarisasi perdagangan
493	0477	Petugas survey pemberian bantuan
494	0478	Petugas survey reklame
495	0479	Petugas teknis fasilitas dan perlengkapan transportasi
496	0480	Petugas teknis pelatihan dan sertifikasi
497	0481	Petugas teknis pelatihan pemagangan
498	0482	Petugas teknis pengendalian alat kebakaran
499	0483	Petugas teknis peralatan kebakaran
500	0484	Petugas teknis produktifitas tenaga kerja
501	0485	Petugas timbangan
502	0486	Petugas youth hostel Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati
503	0487	Polisi pamong praja
504	0488	Pramu kantor
505	0489	Pramu kebun

1	2	3
506	0490	Pramu pelayanan makam
507	0491	Pramu pimpinan
508	0492	Pramusaji
509	0493	Pranata hubungan masyarakat
510	0494	Pranata komputer
511	0495	Programer
512	0496	Protokol
513	0497	Protokol kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
514	0498	Psikolog
515	0499	Rescue
516	0500	Statistiksi
517	0501	Surveyor
518	0502	Surveyor jalan dan jembatan
519	0503	Surveyor jasa konstruksi
520	0504	Surveyor makam
521	0505	Surveyor pemetaan
522	0506	Surveyor pengembangan potensi
523	0507	Surveyor penyiapan lahan jalan dan jembatan
524	0508	Surveyor potensi parkir
525	0509	Surveyor rekayasa teknologi
526	0510	Surveyor ruang milik jalan
527	0511	Surveyor taman dan tanaman hias
528	0512	Surveyor taman penghijauan dan tutus jaalan
529	0513	System enginer
530	0514	Teknisi bangunan dan instalasi air
531	0515	Teknisi gambar
532	0516	Teknisi jaringan
533	0517	Teknisi jaringan komunikasi
534	0518	Teknisi listrik
535	0519	Teknisi mesin
536	0520	Teknisi mobil Pemadam Kebakaran
537	0521	Teknisi pengesahan pertelaan rusun
538	0522	Teknisi perbengkelan
539	0523	Teknisi sarana prasarana lingkungan permukiman
540	0524	Tenaga strategis
541	0525	Tenaga teknis pengendali lingkungan
542	0526	Tenaga teknis pengkajian dampak lingkungan
543	0527	Verifikator keuangan
544	0528	Web master

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS